

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi Massa merupakan komunikasi yang dilakukan kepada massa atau khlayak luas, yaitu menyampaikan pesan atau informasi melalui Media Massa baik itu media Online, Media Elektronik, ataupun Media Cetak.

Dr. Thomas Tokan Pureklolon (2016:144) Media Massa (*mass media*) adalah alat-alat yang digunakan dalam komunikasi massa yang bisa menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Media massa merupakan suatu temuan teknologi yang sangat luar biasa sehingga memungkinkan orang-orang untuk melakukan suatu komunikasi dengan lebih banyak lagi orang disekitarnya, baik yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri.

Berita merupakan suatu informasi yang dapat dipublikasikan dengan berbagai macam media, salah satunya melalui media online, dalam berita yang dipublikasikan tentunya mendapatkan nilai atau pandangan dari pembaca yang berbeda-beda.

Tribunnews.com merupakan salah satu Situs Berita Online yang dikelola oleh PT Tribun Digital Online, Divisi Koran Daerah Kompas Gramedia (Group Of Regional Newspaper). dalam Tribunnews.com menyajikan banyak berita seperti berita nasional, regional, internasional, olahraga ekonomi dan bisnis, hingga entertainment dan gaya hidup.

Media Online Tribunnews.com juga berkaitan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yaitu pada Pasal 3 yang berisi:

1. Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Seperti yang disebutkan pada pasal 3 bahwa media online juga menjadi Kontrol sosial, dimana pemberitaan mengenai Politik dan Pemerintahan menjadi salah satu berita kepada masyarakat dan menjadi fungsi kontrol sosial. Ir. H. Joko

Widodo yang menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia tentunya menjadi salah satu sorotan media massa, terkhusus media online, dan juga menjadi suatu pembahasan pada berita yang dipublikasikan oleh Tribunnews.com.

Dalam banyaknya pemberitaan yang dipublikasikan oleh Tribunnews.com Terdapat suatu berita yang sedang banyak diperbincangkan pada media massa media online yaitu mengenai Omnibus Law Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Tribunnews.com menjadi salah satu media online atau portal berita online yang membahas atau mempublikasikan pemberitaan mengenai Omnibus Law.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 50 (lima puluh) sampel dan salah satu kriteria yang diberikan kepada responden adalah "masyarakat Yogyakarta dan Kota Sorong", peneliti menggunakan audiens pada 2 tempat yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan tanggapan dan respon masyarakat mengenai Omnibus Law Jokowi pada kedua tempat tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama salah satu mahasiswa yang mengikuti demo penolakan omnibus law dikota sorong, Abdul Ramadani (23), dijelaskannya bahwa, setelah yang diperhatikan dari hari pertama hingga hari ketiga (hari terakhir) tanggapan masyarakat kota sorong dibandingkan masyarakat yang berada diluar kota sorong (Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota lainnya) sangat berbeda. Antusias penolakan dikota sorong tidak secepat di kota-kota lain, dikatakan bahwa banyak mahasiswa yang hanya sekedar ikut-ikutan dalam demo atau aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR kota sorong.

Menurutnya, sebagai masyarakat kota sorong telah memahami dan mengerti apa itu omnibus law terkhusus untuk para karyawan dan pengusaha, tetapi tidak ditanggapi secara serius, karena tidak begitu berpengaruh untuk kehidupan mereka sendiri, dianggapnya bahwa hal ini tidak begitu berpengaruh terhadap masyarakat kota sorong, karena keributan atau aksi unjuk rasa yang terjadi di kota sorong dikarenakan menolak omnibus law karena masyarakat terpengaruh oleh aksi unjuk rasa yang terjadi di luar kota sorong, sehingga dikota sorong sendiri juga mengikuti aksi unjuk rasa.

Omnibus Law merupakan undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Dilansir oleh Tribunnews.com bahwa DPR telah mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. UU Cipta Kerja merupakan suatu keinginan Presiden Jokowi yang telah terwujud, keinginan tersebut telah disampaikan sejak dilantik bersama Wapres Ma'Aruf pada 20 Oktober 2019 silam. (Sumber:<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all> diakses pada tanggal 7 November 2020 Pukul 19.20 WIT).

Menurut Presiden Jokowi dengan adanya Kebijakan Omnibus Law berbagai atauran UU yang akan selaras dan memberikan kepastian hukum. (Sumber : <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/26/jokowi-omnibus-law-bisa-berikan-kepastian-hukum> diakses pada tanggal 7 November 2020 Pukul 19.20 WIT).

Kebijakan Presiden Jokowi dalam mendukung disahkannya Omnibus Law oleh DPR menuai banyak kritikan dan tidak disetujui oleh banyak rakyat Indonesia, bahkan terjadi aksi Demo yang dilakukan oleh banyak kalangan termasuk oleh Mahasiswa Indonesia, dengan menggunakan pernyataan Mosi Tidak Percaya hal itu ditujukan bukan hanya kepada DPR RI selaku perwakilan rakyat, melainkan ditujukan juga kepada Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan. (Sumber:<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/16/jokowi-bakal-lengser-gara-gara-demo-uu-cipta-kerja-pdip-bilang-jangan-mimpi-di-siang-bolong?page=2> diakses pada tanggal 7 November 2020 Pukul 21.06 WIT).

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Ciptaker di Istana Negara berujung pada kerusuhan, aksi demo tersebut diikuti kurang lebih 5000 mahasiswa dari 300 kampus. Demo ini juga tidak hanya dilakukan di kota pusat Jakarta, melainkan terlaksana di berbagai Kota atau wilayah di Indonesia.

(Sumber :<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/08/massa-demo-tolak-uu-cipta-kerja-blokade-jalan-di-jakarta-ricuh-di-yogyakarta?page=2> diakses pada tanggal 7 November 2020 Pukul 21.06 WIT). Presiden Jokowi juga pernah mengatakan dalam Pidatonya untuk mendorong upaya penciptaan lapangan kerja,

salah satunya dengan menyederhanakan UU Cipta Kerja, Pada tahun 2021 Presiden Jokowi menargetkan sejumlah perkembangan, antara lain pengangguran berada pada angka 7,7% hingga 9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2% hingga 9,7%, dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377 hingga 0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78 hingga 72,95.

(Sumber : <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/08/14/tolak-ruu-cipta-kerja-yang-mencabut-sejumlah-hak-pekerja-buruh-gelar-demo> diakses pada tanggal 7 November 2020 Pukul 22.01 WIT).

Omnibus Law dianggap merugikan kepentingan buruh dan masyarakat banyak, saat telah disahkan hal tersebut banyak mendapatkan sorotan, termasuk media, berbagai macam tanggapan warganet juga memicu keributan pada media online yang menjadi salah satu hal menonjol dalam komentar pemberitaan mengenai omnibus law, disahkan pada Senin, 5 November 2020, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agus Selasa, 6 Oktober.

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agus.

(Sumber : <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/06/ketok-palu-ruu-cipta-kerja-disahkan-7-poin-ini-jadi-alasan-buruh-tolak-keras-omnibus-law> diakses pada tanggal 7 November 2020 Pukul 22.53 WIT).

Disisi lain, sahnya UU Cipta Kerja ini ditolak oleh Partai Demokrat, dan juga ditolak oleh KSPI dan buruh Indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya. Penolakan juga dilakukan oleh pernyataan resmi, Penolakan omnibus law juga dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang menyampaikan aspirasi penolakan.

1. Gubernur Ridwan Kamil menolak omnibus law dengan mengirimkan surat kepada pemerintah agar menerbitkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

2. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menolak omnibus law dengan meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Omnibus Law.

3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyanggupi permintaan buruh untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan surat kepada DPR RI yang berisi aspirasi buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan Omnibus Law juga disampaikan oleh beberapa bupati/walikota seperti, Bupati Bandung Dadang M. Nasseer, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Walikota Bandung Oded Muhammad, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati Lima puluh Kota Irefendi Arbi, dan Wali Kota Malang Sutiaji.

(Sumber :<https://www.tribunnewswiki.com/2020/10/09/demonstrasi-meluas-berikut-daftar-gubernurbupatiwali-kota-dan-dprd-yang-ikut-menolak-omnibus-law?page=3> diakses pada tanggal 7 November 2020 Pukul 23.12 WIT).

Banyaknya penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law, Presiden Jokowi memberikan alasan bahwa Indonesia membutuhkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, pemerintah tidak akan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja meskipun terdapat banyaknya penolakan oleh rakyat bahkan hingga terjadinya unjuk rasa atau demo yang berkahir ricuh. Tiap tahunnya terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk pasar kerja, Presiden Joko Widodo, Istana Negara Bogor, Jumat, 9 Oktober.

"Pemerintah berkeyakinan melalui UU Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka."

(Sumber :<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/10/diprotas-buruh-dan-akademisi-presiden-jokowi-tetap-akan-berlakukan-omnibus-law-uu-cipta-kerja> diakses pada tanggal 7 November 2020 Pukul 23.34 WIT).

Kritik demi kritik terus dilakukan kepada pemerintah, terkhusus DPR juga Presiden Jokowi, omnibus law tak hanya ditolak oleh rakyat dengan melakukan unjuk rasa atau aksi demo, tetapi kritik tajam dan protes juga di lontarkan dan

diberikan tanggapan oleh warganet dalam pemberitaan yang di publikasikan pada media online.

Karena banyaknya menuai kritik dari rakyat, Presiden Jokowi menyampaikan 8 isu tentang omnibus law UU cipta kerja yang tidak banar diantaranya:

1. Penghapusan UMP, UMK, dan UMSP
2. Gaji dihitung perjam
3. Cuti dihilangkan
4. Perusahaan bisa PHK secara sepihak
5. Penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
6. Komersialisasi pendidikan
7. Keberadaan bank tanah
8. Soal jaminan sosial.

(Sumber : <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/10/penjelasan-jokowi-soal-8-isu-omnibus-law-uu-ciptaker-dari-umk-dihapus-hingga-jaminan-sosial?page=4> diakses pada tanggal 7 November 2020 Pukul 23.58 WIT).

Aktivis yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) memberikikan kritikan terhadap keputusan DPR dalam melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Virus Covid-19. dalam mas pandemi ini DPR dianggap mengambil kesempatan dalam kesempatan, hingga di sahkannya omnibus law UU cipta kerja.

(Sumber: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/03/pembahasan-omnibus-law-di-tengah-pandemi-corona-dinilai-sebagai-bencana-politik> diakses pada tanggal 7 November 2020 Pukul 00.23 WIT).

Dilansir oleh Lokataru.id, menunjukan perbandingan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Pandemi Virus Covid-19 selama rentang waktu Januari-Maret 2020. berbandingan di buat untuk melihat seberapa besar fokus pemerintah terkait kedua isu tersebut. Karena seharusnya pemerintah dan DPR memfokuskan diri dalam penanganan wabah, bukan memanfaatkan keadaan atau bencana covid-19 untuk mensahkan RUU yang banyak ditolak oleh rakyat karena merugikan banyak orang. Berikut tabel perbandingan kedua isu tersebut:

Tabel 1.1

Tabel Perbandingan Pembahasan Omnibus Law dan Virus Covid-19

Waktu	Pembahasan Omnibus Law	Pembahasan Virus Corona
JANUARI 2020		
14 Januari 2020	President Joko Widodo menggelar pertemuan tertutup dengan para anggota partai politik untuk membahas kembali Omnibus Law di House of Representatives. Sekitar 100 Antri Law mengajukan RUU tersebut di berbagai akademi/instansi ahli DPR pada 17 Agustus 2019.	
15 Januari 2020	Terdapat sejumlah tanggapan, salah satunya mengenai RUU, RRU, Jurnal Agung, dan artikel Kementerian untuk menjelaskan perubahan beberapa butir perubahan undang-undang Ordes Law.	
16 Januari 2020	Frasian media melaporkan Omnibus Law memiliki draft yang baik.	
18 Januari 2020	Pembastikan lebih menekankan pada Prosedur dan Draft Ordes Law ke DPR.	
19 Januari 2020	Kelompok terdapat dalam pembahasan untuk Pekerja Indonesia (AMPI) melakukan lobi di dalam DPR untuk menolai Ordes Law Code Lapangan Kerja.	
22 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> Rapat DPR pada 22 Januari mengenai Pembastikan sangat menimbulkan kritik Ordes Law. Keleluasaan Beralat BKR sebagai RRU Ordes Law Code Lapangan Kerja yang membawa sebagai perubahan sebagian pembastikan undang-undang. 	
24 Januari 2020	Melakukan publikasi melalui SNS seperti Facebook mengenai draft Ordes Law sebagai perubahan setelah ini untuk bisa di draft DPR.	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi Tersebut Tokoh Agri Patroto menulis dan mengkritik tentang draft tersebut dalam media massa. Sekelompok Perwakilan Mahasiswa telah menulis pengorganisasian pembastikan virus Corona. Wakil Perwakilan Mahasiswa Anas mengatakan bahwa Pembastikan adalah perubahan amplitas virus Corona melalui ke-hukumannya. Menjadi Tokoh terorganisir seperti di sini ini semua mengatur virus Corona. Menjadi Tokoh terorganisir yang sangat baik untuk mengatur pembastikan virus Corona, jangan malah, malah saja, dalam masa krisis.
27 Januari 2020	Para Menteri Ordes DPR / dan Anggota Parlemen Menolai Beasiswa Pendidikan karena sudah tersedia sebagai subsidi Ordes Law.	<ul style="list-style-type: none"> Presiden menggunakan kata kunci sesuatu yang sangat baik untuk virus Corona. Menjadi Pembastikan adalah Kona Sosial yang sangat baik untuk melawan pembastikan virus pembastikan ke Cina akan ditata dan ke Wuhan sisi.
28 Januari 2020	Pada 28 Januari 2020, Wakil Ketua DPR dan Anggota Parlemen Menolai Beasiswa Pendidikan karena sudah tersedia sebagai subsidi Ordes Law.	SA Kepala KPR Ningsih/Atun tentang Pembastikan Status Kesehatan Tersebut Dinas Kesehatan Wakil Perwakilan Adnan yang Ordes di Indonesia telah menjadi -oh Pembastikan awal..
FEBRUARI 2020		
3 Februari 2020	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengkritik RRU Ordes Law yang telah diumumkan Pemerintah dapat segera diadopsi.	Keleluasaan terdapat di Hangat Lawat Badan hukum, Tawana dikatakan sebagai fokus pembastikan WNI yang diadopsi dari Wuhan, Cina akan waktu 14 hari di Februari - oh Pembastikan awal.
7 Februari 2020	Menjadi Tokoh terorganisir tentang ditandatangani virus Corona bisa melahirkan informasi & informasi lebih.	Menjadi Tokoh terorganisir tentang ditandatangani virus Corona bisa melahirkan informasi & informasi lebih.
8 Februari 2020	Wakil Menteri Keuangan membahas Negara menerima secara penuh untuk menyediakan RUU Ordes Law. Kebijakan ini adalah sebagai ke-oh/oh Indonesia untuk melindungi dan inovasinya.	SA Menteri Kesehatan ThPH/Atun/MENKES/Atun/Atun tentang pembastikan melalui RRU/Ordes sebagai Pembastikan yang dapat ditandatangani untuk dan upaya pembastikan.
10 Februari 2020	Salah satu latar belakang Pembastikan Menak Kematangan dan Kesehatan yang mengingatkan bahwa Corona adalah penyakit yang disebabkan virus Corona sebagai infeksi. "Corona adalah Bakteri" tidak "Mendukung" karena sudah terbastikan.	Salah satu latar belakang Pembastikan Menak Kematangan dan Kesehatan yang mengingatkan bahwa Corona adalah penyakit yang disebabkan virus Corona sebagai infeksi. "Corona adalah Bakteri" tidak "Mendukung" karena sudah terbastikan.
11 Februari 2020	Menjadi Tokoh terorganisir yang sangat baik dari peneliti Harvard T.H. Chan School of Public Health yang mengungkapkan virus Corona sebagai model untuk ke-hukumannya.	Menjadi Tokoh terorganisir yang sangat baik dari peneliti Harvard T.H. Chan School of Public Health yang mengungkapkan virus Corona sebagai model untuk ke-hukumannya.
12 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> DPR terima draft Ordes Law yang diadopsikan oleh Menak Kematangan dan Kesehatan. 	

	<ul style="list-style-type: none"> Masa pelaksanaan TPT melibatkan semua di bawah DPRD dengan narasumber pembicara Undang Law yang dianggap relevan. 	
15 Februari 2020		Keluar Mekanis Perekonomian, Anggaran Harta, ya merupakan bahwa karena pertama di Indonesia berliberalitas maka virus Corona itu bisa masuk. Tapi Undang Law tentang perlakuan kebijakan kerja jadi baru.
16 Februari 2020	Berkas Kebijakan Sektor Publik Indonesia (KSPI) akan menggantikan buku buku-buku di 21 Provinsi di Indonesia terkait Undang Law	
17 Februari 2020	Rencana Anggaran Mula Kerja (RAMK) di dalam sektor 19 orang yang melakukan proses; melakukan bisa untuk meminati. Masing Masing (Kamus KAMRI) sebagai provokasi serta berkoordinasi dengan yang dapat dikecualikan bahwa untuk pendanaan Undang Law.	<ul style="list-style-type: none"> Dalam beberapa kesempatan Menteri Yonius mengatakan bahwa dia, Indonesia telah dari virus Corona. Keluar dari karya sendiri Mestadi, yang mengatakan bahwa virus (COVID-19) tidak masuk ke Indonesia karena tiap hari kita sudah ada karantina.
18 Februari 2020	Perwakilan utama organisasi bisnis ke dalam dalam tim perbaikan RUC Undang Law Cipta Kerja di dalam sebagai cara untuk Penetapan untuk mendapatkan dampak positif.	
20 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> Menteri Koordinator dan Menteri Dalam Negeri Penetapan menggunakan sistem mampu bentuk baru bentuk baru bentuk ini baru untuk ini, "Apa yang akan di lakukan" bentuk itu, ukuran. IRI akan menggunakan untuk ini, ini akan ada di tempat perwakilan yang menurut RUC Undang Law Cipta Kerja. Menteri Perencanaan Anggaran Harta mengatakan bahwa akan melakukan perubahan dalam rangka perbaikan RUC Undang Law. 	
21 Februari 2020	Survei Jakarta Fungsi dan menyatakan dari itu masalah yang tidak dari itu karena di di provinsi menyatakan bahwa Undang Law Cipta Kerja dalam proses penyempurnaan tidak melakukan realisasi.	
25 Februari 2020	DPR terus melakukan Undang Law yang akan akan akan.	
26 Februari 2020		Masa Presiden Jokowi akan menggunakan banyak lagi dan juga yang akan membuat dia benar yang menjadi ada ada yang bisa virus Corona memang dari Indonesia.
27 Februari 2020	DPR sudah melakukan Undang Law di lakukan dengan cepat dengan semua itu sebagai tidak ada lapangan yang termasuk melakukan yang akan proses ke pada Perencanaan dan DPR.	
28 Februari 2020	Menteri Perencanaan Anggaran Harta mengatakan Perencanaan tidak akan melakukan dari Undang Law.	<ul style="list-style-type: none"> PM Aprilia akan Menteri memperpendek karena yang menyatakan seperti ini ini belum tentu, kata para para, virus Corona di Indonesia. Pemerintah melakukan standar standar (M) sebagai Rp 100 Miliar untuk virus penyakit guna mengantisipasi. Langkah utama yang akan dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> Rapat dan di dalam Rp 100 miliar. Proses pelaksanaan tidak akan proses apapun ke Indonesia untuk Rp 100 Miliar. Keputusan akan Rp 100 Miliar.
29 Februari 2020		SR Kepala RUPB No 21, 22 dan tentang Pengawasan Standar Keadan Terutama Berasal dari dari Mekanis Mekanis Akhri Virus Corona di Indonesia (tidak ada sebelum 29 Mei 2020).
MAREP 2020		
1 Maret 2020		<ul style="list-style-type: none"> Kami pergi virus Corona pertama kali yang terjadi di Amerika dan kemudian ke Perancis. Bupati U. Kamari, saat diundang sebagai Pembicara dihadapan Badan Perencanaan Indonesia untuk menyampaikan hasil penemuan virus Corona yang sebelumnya telah dilakukan oleh TPT sendiri. Menteri Tenaga kesehatan persiapan Indonesia (DPR) Jakarta akan bersedia yang menyatakan bahwa akan ada yang di DPR bahwa akan persiapan dan perwakilan karena waktu virus Corona tersebut Mekanis semua penemuan melalui jalan yang akan dilakukan hasil cepat.
5 Maret 2020	RKA, DAAK, MAREP. Baru seperti Undang. Dengan Perencanaan untuk bisa pada saat ini untuk RUP mengorganisasi Undang Law Cipta Kerja.	Perencanaan RUC Undang Law ini akan membuat reformasi anggaran dan waktu yang sudah virus Corona karena pemerintah sudah akan melaksanakan kebijakan.
6 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> Menteri RUM Sejahtera Indonesia (RUM SE) menyatakan akan di dapat DPR untuk melakukan Undang Law. Keluar dari RUM Sejahtera akan mengatakan bahwa sudah benar dan juga akan melakukan untuk pemerintah untuk membuat Undang Law. 	
9 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan menggunakan peralihan untuk melakukan perbaikan Undang Law. Menteri Perencanaan Anggaran Harta akan kembali meminati MFI untuk meminati masalah terkait Undang Law. Menteri Perencanaan Anggaran Harta mengatakan bahwa Perencanaan sedang mempersiapkan di "Rencana Perencanaan Perencanaan (RPP) dan masih menunggu Perencanaan Perencanaan (RPP) dan masih menunggu Perencanaan Perencanaan (RPP) yang akan menjadi pemerintah pelaksanaan dari Undang Law Cipta Kerja. 	
9 Maret 2020		Perencanaan melibatkan Perencanaan Kewajiban, Perencanaan Kewajiban, Perencanaan Pengawasan Perencanaan, Perencanaan

		<p>Atas Perintah dan Perintah Atas Publik dan Transparansi. Perintah tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kesehatan.</p> <p>Medan tersebut diadopsi untuk memastikan informasi mengenai kasus virus Corona. Ia dianggap merupakan perintah dan merupakan alat utama yang telah memantapkan untuk memberikan masukan kepada Presiden mengenai risiko ini, namun aksi ini dibatalkan.</p>
9 Maret 2020		
10 Maret 2020		<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Kesehatan N. Ploegh mengungkapkan bahwa dalam rangka melindungi publik, pemerintah harus mengambil prosedur Pemerintah Pusat supaya satu sisi dapat memastikan tidak ada dilakukannya kembali beberapa prosedur DRG jika tidak membuat siswa-siswa yang merupakan tenaga pembaharuan virus Corona di Sukera. • Per 15 pejabat pemerintah untuk menangani Covid-19 yang termasuk dalam 14 Menteri Kesehatan Nasional yang ditetapkan 15 Menteri Percepatan Perintah untuk Mengurangi Terorisme.
11 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Sejumlah pejabat pemerintah harus melakukan demo di depan mata Kota dan DPRD DKI Jakarta terkait perubahan RUU Ordonansi Law • Menteri Kesehatan Rizki Purwati (G08AM) menyatakan akan melakukan terkait Ordonansi Law di depan Kantor Gubernur, Jakarta • Atas persetujuan Ordonansi Law yang terdiri dari Karyakarting, Kesehatan, dan lainnya, Menteri melakukan demo di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan. 	
12 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Percepatan Mengajar (G08AM) telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan Ordonansi Law dan mengizinkan para guru pengabdian di DPR • Demo terjadi dan demonstrasi digelar di Gedung wakil-wakil dalam Ordonansi Law 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Menteri Nasional yang berkoordinasi Percepatan (koordinasi Demo Covid-19) sebagai pemertanian dan pengabdian terakap-19 penerapan yang telah dilakukan oleh pemerintah. • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan. • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan.
13 Maret 2020	<p>Demonstrasi Berlangsung Melibatkan lebih dari 10000 orang di depan Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan dengan berbagai demonstrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan. • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan.
14 Maret 2020	<p>Peraturan Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan dan Menteri (10) Percepatan melakukan demonstrasi untuk mengizinkan para guru pengabdian di DPR dan Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan terkait perubahan Ordonansi Law</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan. • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan.
15 Maret 2020	<p>Ministri Kesehatan dan 10 Menteri Percepatan melakukan demonstrasi untuk mengizinkan para guru pengabdian di DPR dan Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan terkait perubahan Ordonansi Law</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan. • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan.
17 Maret 2020		<p>Menurut Menteri Kesehatan (10) Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan.</p>
18 Maret 2020	<p>1000 Demonstrasi Percepatan dan DPR akan mengizinkan perubahan Ordonansi Law dan akan melakukan demonstrasi untuk mengizinkan para guru pengabdian di DPR</p>	
19 Maret 2020		<p>Percepatan virus Corona di daerah Jakarta yang menjadi salah satu provinsi virus Corona diumumkan kepada Aksi Kesehatan.</p>
24 Maret 2020		<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan. • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan. • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan.
27 Maret 2020		<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan. • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan. • Menteri Kesehatan (10) di Percepatan akan mengizinkan 100% guru di dan pemerintahan 100% pada saat ini pemerintah akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Jakarta dan akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan.

		penyebaran virus Corona akan meningkat 4,2 juta orang.
23 Maret 2020		Pjubi Kattor Staf Komunikasi OSPP menyatakan bahwa tidak beres-fraksi mengenai informasi program ini tidak bisa ditarik sampai belahan.
24 Maret 2020	Aksi DPR Rasi Malarwa putikan penulisan Omnibus Law akan tetap berjalan untuk memastikan setelah merubaha itana pendatang ke RI 2020-2025.	Perwakilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai peraturan kesehatan yang tidak tidak oleh Pemerintah Pusat.
9 Maret 2020	Kial Iqbal (Kaitan KSP) menyalah uraian Fraksi Partai Solidaritas untuk mengkritik penulisan Omnibus Law. Uraian tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki cukup sebaday nilai-kait.	Panayitah berbicara mami: pelaksanaan PSBB dan diperlakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Sosial Berskala Besar dari Keputusan (Keputusan Presiden) Percepatan Kolaborasi Kebijakan Masyarakat serta Perppu mengenai aliansi untuk penanganan COVID-19.

Dilansir oleh Tribunnews.com, Aksi unjuk rasa menolak omnibus law yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 juga memicu terjadinya penyebaran virus covid-19. Pernyataan Ahli Epidemiologi dari Universitas Airlangga (UNAIR), Minggu, 11 Oktober 2020.

"Memang demonstrasi-demonstrasi kemarin sangat berisiko tinggi terjadinya penularan Covid-19, pelonjakan angka konfirmasi akan tampak 7-14 hari setelah hari-hari ini," Ungkap Windu.

(Sumber :<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/10/penjelasan-jokowi-soal-8-isu-omnibus-law-uu-ciptaker-dari-umk-dihapus-hingga-jaminan-sosial?page=4> diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 11.39 WIT).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas dan untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait hal tersebut peneliti ingin mengetahui seberapa kuat dan berpengaruhnya "Pengaruh Pemberitaan Tentang Kebijakan Omnibus Law Jokowi Di Tribunnews.Com Dan Citra Jokowi Terhadap Kepercayaan Masyarakat"

Presiden Jokowi juga menegur jajaran kabinet karena komunikasi publik yang buruk dalam menyampaikan Undang-undang Cipta Kerja. Moeldoko, Rabu, 21 Oktober 2020.

"Khusus dalam konteks omnibus law, memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan presiden sangat sangat tahu, kami semuanya ditegur sama presiden, bahwa komunikasi kita sangat jelek" Kata Moeldoko

(Sumber :<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/21/soal-uu-cipta-kerja-moeldoko-kami-ditegur-presiden-karena-komunikasi-yang-jelek> diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 11.03 WIT).

Dari berita yang banyak disebarakan salah satunya adalah mengenai Omnibus Law UU Cipta kerja yang dikatakan bahwa terdapat salah dalam pengetikan atau dalam penulisan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal

dengan UU omnibus law Ciptaker/ UU Ciptaker. Kekeliruan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani oleh Presiden disebutkan tidak mengubah substansi. Eddy Cahyono Sugiarto, Rabu 4 November 2020.

"Kemensetneg telah melakukan serangkaian pemeriksaan internal dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, kekeliruan tersebut murni human error," kata Asisten Deputi Hubungan masyarakat Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, (Sumber : <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/05/dampak-uu-ciptakerja-salah-ketik-para-pejabat-yang-bertanggungjawab-telah-dijatuhi-sanksi-disiplin-diakses-pada-tanggal-8-November-2020-Pukul-11.13-WIT>).

1.2 Rumusan Masalah

Omnibus Law UU Cipta Kerja yang di Sahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 menuai banyak kritikan dari Rakyat Indonesia, berbagai macam pemberitaan terkait Omnibus Law ini tersebar dibanyak media online termasuk Tribunnews.com. Sebelumnya, telah dilakukan juga unjuk rasa atau aksi demo untuk menolak RUU Cipta Kerja, namun seiring berjalannya waktu, tepat pada masa pandemi Covid-19, Omnibus Law UU Cipta Kerja di Sahkan oleh DPR, dan terjadi kembali unjuk rasa atau aksi demo yang di lakukan oleh banyak Rakyat Indonesia, buruh, mahasiswa indonesia, aktifis, organisasi, dan massa lainnya. Omnibus Law UU Cipta Kerja ini tentunya membawa banyak kontra oleh publik, pemerintah menolak untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut, dan menyebabkan terjadi aksi unjuk rasa atau demo yang berakibat keriuhan.

Tribunnews.com yang juga sebagai media massa kerap mempublikasikan berita mengenai kebijakan Presiden Jokowi mengenai Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tetap di sahkan walaupun mendapat banyak penolakan. Kemudian, berbagai pemberitaan terkait omnibus law yang tersebar juga membuat citra jokowi menurun dimata rakyat karena tidak adanya kehadiran dan tanggapan sewaktu aksi demo berlangsung. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah jokowi disuarakan oleh massa bahwa tidak lagi percaya pada pemerintah, DPR, termasuk Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan data diatas , peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemberitaan terkait Kebijakan Omnibus Law Jokowi di Tribunnews.com mempengaruhi kepercayaan masyarakat?

2. Apakah citra Jokowi mempengaruhi kepercayaan masyarakat mengenai Kebijakan Omnibus Law?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberitaan terkait Kebijakan Omnibus Law Jokowi di Tribunnews.com terhadap Kepercayaan Masyarakat?

2. Untuk mengetahui pengaruh Citra Jokowi terhadap Kepercayaan masyarakat mengenai Kebijakan Omnibus Law?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan adanya pengaruh antara pemberitaan di media massa media online Tribunnews.com terkait Kebijakan Omnibus Law, dan juga Citra Jokowi terhadap Kepercayaan Masyarakat. Dan dapat bermanfaat bagi komunikasi, khususnya pada komunikasi massa, dan pengaruh pemberitaan pada media online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada pelaku bisnis di media massa khususnya pada media online Tribunnews.com terkait Omnibus Law dan memberikan pandangan juga pemahaman kepada masyarakat terkait pengaruh berita pada media online dan Citra Jokowi terhadap kepercayaan masyarakat.

3. Manfaat Sosial

Secara sosial penelitian ini dapat menjadi suatu pembelajaran atau pemahaman masyarakat dalam mengetahui dan memahami setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya dalam media massa, untuk

menarik pembaca berita terkait Kebijakan Omnibus Law Jokowi di Tribunnews.com dan juga Citra Jokowi terhadap Kepercayaan Masyarakat.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 State Of The Art

Penelitian sebelumnya diambil melalui beberapa penelitian yang akan mendukung penelitian ini. Jurnal-jurnal tersebut antara lain sebagai berikut:

Jurnal pertama adalah penelitian yang berjudul "*Pengaruh Intensitas Membaca Berita tentang Ganjar-Pranowo di Surat Kabar Daerah dan Interaksi dengan Kelompok Rujukan terhadap Tingkat Kepercayaan masyarakat Mengenai Kinerja Gubernur*". yang diteliti oleh Arifa Rachma Febriyani diteliti pada tahun 2014, hasil penelitian ini terdapat hubungan antara intensitas membaca berita dengan tingkat kepercayaan masyarakat dengan menggunakan *teori Efek Media Massa Dan Teori Kelompok Rujukan* dibuktikan dengan analisis Regeresi Linear Sederhana, diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 dan persamaan regresi $Y + 39.517 + 0.419 X1$. Oleh karena $sig\ 0.000 < 0.01$, maka H_0 ditolak dan dinyatakan bahwa intensitas membaca berita tentang Ganjar Pranowo di surat kabar daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat mengenai kinerja gubernur. Kemudian, dibuktikan dengan analisis Regeresi Linear Sederhana, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.001 dan persamaan regresi $Y - 36.340 + 0.234 X2$. Oleh karena $sig\ 0.001 < 0.01$, maka H_0 ditolak dan dinyatakan bahwa interaksi dengan kelompok rujukan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat mengenai kinerja gubernur.

Penelitian kedua, berjudul "*Pengaruh Pemberitaan Media Massa Terhadap Kredibilitas Pemimpin Simbolik Keagamaan*" yang diteliti oleh Iwan Joko Prasetyo pada tahun 2016, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, teori yang digunakan adalah *teori Efek Media Massa* dan *teori Kepemimpinan*. Penelitian ini dilakukan, untuk mencoba mengungkap kredibilitas seorang KH. Fuad Amin sebagai pemimpin simbolik keagamaan yang tertangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena kasus korupsi. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan kasus korupsi KH. Fuad Amin di media massa

berpengaruh secara signifikan terhadap kredibilitas pemimpin simbolik keagamaan, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-2,329 > 1,667$, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesa satu diterima dengan tingkat signifikansi 5%.

Penelitian ketiga merupakan penelitian yang berjudul "*Terpaan Pemberitaan Media Massa Dan Tingkat Kepercayaan masyarakat Pada Kompetensi Jokowi Sebagai Pemimpin Terhadap Minat masyarakat Memilih Jokowi Sebagai Capres*" yang diteliti oleh Titan Armaya yang dilakukan pada tahun 2014, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terpaan pemberitaan media massa dan tingkat kepercayaan masyarakat pada kompetensi Jokowi sebagai pemimpin terhadap minat masyarakat memilih Jokowi sebagai capres. peneliti menggunakan teori *Dependensi Efek Komunikasi Massa*, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu multistage random sampling dengan Populasi, penduduk berusia 17-60 tahun di Kelurahan Sendangmulyo dan Sampel, penduduk berusia 17-60 tahun di RW IV Kelurahan Sendangmulyo sebanyak 100 orang. Dari Uji Regresi Linier Sederhana yang dilakukan antara Terpaan Pemberitaan Media massa dengan Tingkat Kepercayaan masyarakat Pada Kompetensi Jokowi sebagai Pemimpin, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.075. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh diantara kedua variabel karena signifikansi level di antara dua variabel melebihi batas toleransi signifikansi, yaitu 0,05. Kemudian, dibuktikan lagi dengan uji Regresi dengan variabel Dummy antara Tingkat Kepercayaan masyarakat Pada Kompetensi Jokowi sebagai Pemimpin dengan Minat masyarakat Memilih Jokowi sebagai Capres, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 dan persamaan regresi $Y = -0,501 + 0,021Z$. Oleh karena $\text{sig } 0.000 < 0.01$, maka H_0 ditolak dan dinyatakan bahwa Tingkat Kepercayaan masyarakat pada Kompetensi Jokowi Sebagai Pemimpin bernilai positif yaitu 0,021 terhadap Minat masyarakat Memilih Jokowi sebagai Capres.

Selanjutnya, penelitian keempat berjudul "*Tingkat Kepercayaan masyarakat Terhadap Berita Pada Media Yang Terlibat Dalam Politik*" diteliti oleh Adek Darmawan dan Hamdani M. Syam pada tahun 2017, penelitian ini menggunakan teori *Uses And Gratification*, Latar belakang teori ini berfokus terhadap audiens. Dimana teori ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana audiens

memilih media yang mereka inginkan. Dimana mereka merupakan audiens yang secara aktif memilih dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda di dalam mengkonsumsi media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan metode asumsi klasik, dengan uji regresi sederhana dan dilakukan Analisis regresi sederhana yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variable bebas yaitu, media yang terlibat dalam politik (X) terhadap kepercayaan masyarakat(Y) sebagai variable bebas. Persamaan regresinya yaitu $Y = a + bX$ Y : kepercayaan masyarakat, X : media yang terlibat dalam politik, dan a : konstanta. Dari hasil pengolahan data dan analisa hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan yaitu, Pertama, dari hasil pengolahan data kepercayaan masyarakat kecamatan Syiah Kuala sebanyak 77 orang (77%) memilih siaran Tv One sebagai siaran sehari-hari mereka dalam menyaksikan berita. Kedua, Kepercayaan masyarakat dalam menyaksikan berita televisi selain dari pemilik yang terlibat dalam politik namun isi berita, pola acara dan kemasan yang ditampilkan oleh televisi sangat berpengaruh dalam kepercayaan masyarakat. Ketiga, Masyarakat kecamatan Syiah Kuala juga memilih siaran RCTI sebagai siaran kedua yang dipercaya setelah siaran TV One.

Tabel 1.2
Tabel Daftar *State of The Art*

Tahun	Judul Penelitian	Nama peneliti	Perbedaan
2014	Pengaruh Intensitas Membaca Berita tentang Ganjar Pranowo di Surat Kabar Daerah dan Interaksi dengan Kelompok Rujukan Terhadap Tingkat Kepercayaan	Arifa Rachma Febriyani	Penelitian Ini Menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana.

2016	Pengaruh Pemberitaan Media Massa Terhadap Kredibilitas Pemimpin Simbolik Keagamaan.	Iwan Joko Prasetyo	Penelitian ini menggunakan dua teori, teori Efek Media Massa dan teori Kepemimpinan.
2014	Terpaan Pemberitaan Media Massa Dan Tingkat Kepercayaan masyarakat Pada Kompetensi Jokowi Sebagai Pemimpin Terhadap Minat masyarakat Memilih Jokowi Sebagai Capres..	Titan Armaya	Penelitian ini menggunakan teori Dependensi Efek Komunikasi Massa.
2017	Tingkat Kepercayaan masyarakat Terhadap Berita Pada Media Yang Terlibat Dalam Politik.	Adek Darmawan dan Hamdani M. Syam	Penelitian ini menggunakan teori Uses And Gratification

Dari beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya yang juga membahas mengenai pemberitaan, media massa, media online. Terdapat penelitian yang membedakan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang peneliti teliti yaitu pada fokus pembahasan.

1.4.2 Pengaruh Pemberitaan Tentang Kebijakan Omnibus Law Jokowi di Tribunnews.com

Suharno dan Retnoningsih (2006) mengatakan bahwa Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda,orang) yang ikut membentuk watak, perbuatan seseorang atau kepercayaan.

Kemudian, menurut Hugiono dan Poerwantana (2000:47) pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek yang terjadi.

Dilihat dari definisi dari Pengaruh, Pengaruh Pemberitaan Tentang Kebijakan Omnibus Law Jokowi di Tribunnews.com merupakan kegiatan mendapatkan berbagai informasi terkait hal tersebut dan menghasilkan efek pada pembaca.

1.4.3 Pengaruh Berita Di Media Massaa (Media Online)

Komunikasi Massa merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media massa. Dr. Thomas Tokan Pureklolon (2016:144) Media Massa (*mass media*) adalah alat-alat yang digunakan dalam komunikasi massa yang bisa menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Media massa merupakan suatu temuan teknologi yang sangat luar biasa sehingga memungkinkan orang-orang untuk melakukan suatu komunikasi dengan lebih banyak lagi orang disekitarnya, baik yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri.

Media massa yaitu berupa media cetak, media elektronik juga media online. Media online memiliki banyak pengauh, dan juga memiliki kekurangan juga kelebihan. Media online menjadi salah satu hal yang penting oleh masyarakat, melihat fungsinya dalam mempublikasikan berita yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, pemberitaan yang di publikasikan pada media online juga tentunya memiliki pengaruh terhadap pembaca berita.

1.4.4 Citra Tokoh

Citra Tokoh adalah satu keyakinan atau kepercayaan kepada seorang tokoh entah itu tokoh politik atau lainnya, dan dapat terbagi menjadi citra baik ataupun citra buruk. Menurut G. Sach dalam Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2007:171) citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap-sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok yang berbeda. Adapun proses pembentukan citra, Citra membentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang, komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan, begitu yang diungkap Elvinaro dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relations tahun 2002, dikutip dari Danasaputra tahun 1995.

1.4.5 Pengaruh Pemberitaan Tentang Kebijakan Omnibus Law Jokowi Di Tribunnews.Com

Teori yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel penelitian ini adalah Teori Efek Afektif Media Massa. Menurut Wiryanto, (2000:39) Efek diketahui melalui tanggapan khalayak (*response audience*) yang digunakan sebagai umpan balik (*feed back*). Jadi, umpan balik merupakan sarana untuk mengetahui efek.

Menurut Ardianto, Elvinaro dkk (55) Efek Afektif merupakan efek yang kadarnya lebih tinggi dari pada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberi tahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah dan sebagainya.

Dampak pesan media massa sampai pada tahap afektif terjadi bila pesan yang disebarakan media mengubah apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. Dampak ini berkaitan dengan perasaan, penilaian, rangsangan emosional, dan sikap.

Zan Pieter Herri dan Namora Lumong (2010:50), Sikap memungkinkan untuk mengevaluasi seseorang dari suatu objek yang bervariasi mulai dari sangat negatif sampai sangat positif, selain itu mengakui manusia yang bertentangan atau ambivalen terhadap makna objek pada waktu berbeda mengekspresikan sikap positif dan negatif terhadap objek yang sama.

1.4.6 Pengaruh Citra Jokowi Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Selama menduduki jabatan sebagai seorang Presiden, Jokowi harus menghadapi beberapa permasalahan global, termasuk pandemi Covid-19 dan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dilansir dari Jurnalpalopo.com, mendapati tiga alasan Jokowi mengalami

Krisis Kepercayaan dari Masyarakat yaitu;

1. Gagal melindungi masyarakat Indonesia dari Covid-19

Per 3 November 2020, Indonesia tercatat memiliki 415.402 kasus COVID-19, tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat ke-19 di dunia.

2. Gagal mendengarkan keprihatinan masyarakat

Jokowi seakan menutup telinga atas tuntutan masyarakat untuk menghentikan pengesahan RUU Cipta Kerja. Dan Sebaliknya Jokowi dan anggota parlemen diam-diam mengeluarkan undang-undang yang dikritik dan ditolak oleh Rakyat Indonesia. (Sumber: <https://jurnalpalopo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-43922818/3-alasan-presiden-jokowi-mengalami-krisis-kepercayaan-dari-masyarakat?page=4> diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 23.18 WIT).

Castillo (2011) Kepercayaan merupakan dasar dalam membangun suatu hubungan antar individu, kelompok atau institusi. Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik menjadi sangat penting dan vital. Institusi yang mendapatkan kepercayaan masyarakat akan memiliki legitimasi dan kewibawaan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap institusi publik lebih memiliki kemauan untuk terlibat dalam segala aktifitas kehidupan yang diselenggarakan institusi publik.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti. Menurut Sekaran (2006) hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

H1: Terdapat pengaruh pemberitaan mengenai Kebijakan Omnibus Law Jokowi di Tribunnews.com

H2: Terdapat pengaruh Citra Jokowi terhadap Kepercayaan masyarakat mengenai Kebijakan Omnibus Law

1.6 Definisi Konseptual

1.6.1 Pemberitaan Tentang Kebijakan Omnibus Law Jokowi Di Tribunnews.Com

Pengaruh merupakan dorongan yang bersifat membentuk atau sesuatu yang menimbulkan efek pada pemberitaan pada publik mengenai kebijakan omnibus

law Jokowi di Tribunnews.com. Hal tersebut dilandasi pada banyaknya khalayak atau publik yang mengakses dan membaca berita mengenai kebijakan omnibus law Jokowi di Tribunnews.com.

1.6.2 Citra Jokowi

Menurut Kotler (2005:226) *brand image* (citra) adalah kumpulan keyakinan atau kepercayaan atas merek/brand tertentu. Citra Jokowi adalah pandangan atau persepsi masyarakat terhadap Presiden Republik Indonesia tersebut, Citra tergantung kepada bagaimana masyarakat memandang Presiden Jokowi.

1.6.3 Kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi mengenai pemberitaan omnibus law

Kepercayaan masyarakat mengenai kebijakan Presiden Jokowi terkait pemberitaan omnibus law termasuk pemberitaan di sahkannya omnibus law UU cipta kerja pada Tribunnews.com adalah keyakinan dan kepercayaan terhadap keputusan Pemerintahan Jokowi dalam memutuskan disahkannya omnibus law UU cipta kerja.

1.7 Definisi Operasional

Tabel 1.3
Definisi Operasional

No	Variabel	Dimensi Variabel	Petanyaan
1	Pengaruh pemberitaan tentang kebijakan omnibus law jokowi di Tribunnews.com	Frekuensi Pemberitaan	a. Keyakinan terhadap berita b. Banyaknya akses berita
		Manfaat Pemberitaan	a. Keyakinan terhadap manfaat informasi yang dipublikasikan b. Keyakinan terhadap manfaat memberikan pengetahuan dan pemahaman oleh berita
		Performance	a. Apakah isi berita omnibus law pada

			<p>Tribunnews.com sudah memuat berita yang benar</p> <p>b. Apakah berita omnibus law mudah dipahami oleh pembaca berita</p>
		Features	<p>a. Penilaian pembaca berita terhadap keistimewaan Photo di Tribunnews.com</p> <p>b. Penilaian konsumen terhadap keistimewaan variasi isi berita terkait omnibus law di Tribunnews.com.</p>
2	Citra Jokowi	Attributes	<p>a. Karakteristik Presiden Jokowi</p> <p>b. Kegiatan Yang Dilakukan Jokowi</p> <p>c. Sikap Jokowi terhadap masyarakat</p>
		Benefits	<p>a. Manfaat kebijakan omnibus law jokowi</p> <p>b. Kepercayaan masyarakatdibawah pimpinan Jokowi</p> <p>c. Upaya Jokowi dalam mengatasi penolakan dan aksi unjuk rasa mengenai di sahkannya omnibus law UU cipta kerja</p>
		Brand Attitude	<p>a. Tranparansi kinerja dan keputusan pemerintahan Jokowi</p> <p>b. Tanggapan Jokowi dalam menanggapi penolakan omnibus law UU cipta kerja oleh Rakyat Indonesia</p>
3	Kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi mengenai pemberitaan omnibus law	Kepercayaan Masyarakat	<p>a. Kepercayaan terhadap Jokowi dalam keputusan di sahkannya omnibus law UU cipta kerja</p> <p>b. Kepercayaan terhadap Jokowi dalam mengatasi penolakan omnibus law UU cipta kerja</p>

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif yang memiliki tujuan untuk melihat hubungan variabel dan obyek yang diteliti, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependent. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Survey yakni, peneliti menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian.

1.8.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Cooper (2003) Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa atau benda yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diteliti.

Djarwanto (1994 : 420) Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda.

Menurut Margono (2004), Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data, jika seorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia.

Populasi dalam penelitian ini adalah pembaca berita pada media online atau portal berita online.

2. Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probabilitas (non-probability sampling). Dr. Sudaryono (2017:181) Non-probability sampling merupakan suatu prosedur penarikan sampel yang bersifat subjektif, dalam hal ini probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembaca berita yang masuk dalam kriteria pembaca berita di Tribunnews.com

3. Teknik Sampling

Dr. Sudaryono (2017:175) Teknik sampling merupakan suatu proses pilihan sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karakteristik subjek sampel, memungkinkan untuk menggeneralisasi karakteristik elemen populasi.

Menurut Arikunto (2010) Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Dr. Sudaryono (2017:181) Non-probability sampling merupakan suatu prosedur penarikan sampel yang bersifat subjektif, dalam hal ini probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Teknik ini digunakan karena tidak adanya data valid mengenai total dari populasi pembaca berita di Tribunnews.com, dan responden yang akan diteliti tidak dapat di pastikan atau dijumlahkan secara pasti.

Jenis sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah, *purposive sampling* dan *quota sampling*. Dimana

Purposive sampling yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti akan menentukan pengambilan sampel dengan cara membuat kriteria atau ciri-ciri khusus untuk responden yang sesuai dengan penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban permasalahan penelitian. Menurut Notoatmodjo (2010) *purposive sampel* merupakan pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.

Dr. Sudaryono (2017:183) *quota sampling* merupakan bentuk lain dari penarikan sampel berdasarkan pertimbangan. *Quota sampling* dilakukan dengan cara mengambil sampel dengan menetapkan jumlah subjek yang akan diteliti.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner yang telah diisi dengan beberapa pertanyaan dan di bagikan secara online kepada responden.

Penggunaan kuesioner online dalam penelitian ini juga karena jumlah responden yang cukup banyak atau cukup besar, sehingga mempermudah dalam penyebaran kuesioner tersebut.

1.8.4 Teknik Analisa Data

Sugiyono (2010) Teknik analisis data ialah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi. Dalam pandangannya dalam teknik analisis data tidak bisa disamakan antara satu penelitian dengan peneliti yang lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan.

1. Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Sebelum melakukan teknik analisis data digunakan dulu uji validitas dan reliabilitas yaitu untuk mengukur valid tidaknya kuesioner.

a. Uji Validitas

Validitas menurut Sugiyono (2016:177) menunjukkan derajat ketepatan- 69 antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama atau diatas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Realibilitas

Menurut Sugiyono (2012:177), Uji realibilitas kuesioner dalam penelitian digunakan *metode split half* item tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok item ganjil dan kelompok item genap. Kemudian masing-masing kelompok skor tiap itemnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. Apabila korelasi 0,7 maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat reliabel yang cukup, sebaliknya apabila nilai korelasi dibawah 0,7 maka dikatakan item tersebut kurang reliabel.

c. Analisis Regresi Sederhana

Peneliti akan menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji atau mengetahui ada tidaknya pengaruh dalam kedua variabel penelitian. Menurut Siregar dalam Noviansyah (2019 : 77), rumus regresi linier sederhana yaitu:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

- Y : Variabel Dependen (Citra Jokowi terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebijakan Omnibus Law)
- a : Konstanta
- b : Koefisien untuk variable X
- X : Variabel Independen (Pengaruh Pemberitaan tentang Kebijakan Omnibus Law Jokowi di Tribunnews.com)

